

Sekilas Tentang Peran BPKP dalam Proses RB Nasional

Pemerintah RI menyadari benar jika reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa melakukan reformasi atas birokrasi maka bangsa ini hanya akan lelah menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang besar tanpa menghasilkan sebuah perubahan dalam pelayanan publik.

Jika kembali ketujuan didirikannya sebuah negara maka tujuannya tidak lain adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman berbagai negara dibelahan bumi menunjukkan sebuah pemerintahan hanya akan sukses mencapai tujuan bernegara jika dikelola oleh birokrasi yang handal.

Lalu pertanyaannya adalah apakah birokrasi di Indonesia sudah mampu mencapai tujuan bernegara? Jawabannya bisa bermacam-macam tergantung siapa yang memandang. Jika dari sudut pandang pemerintah maka perubahan dalam segala lini telah dilakukan dalam mereformasi birokrasi namun masyarakat Indonesia masih berharap agar pemerintah Indonesia dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kasus korupsi, lemahnya penegakan hukum, angka kemiskinan yang belum menunjukkan penurunan secara signifikan menunjukkan birokrasi kita masih belum bekerja secara optimal. Untuk itu, pemerintah melalui *grand design* reformasi birokrasi nasional 2010 sampai dengan 2025 telah meletakkan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam proses reformasi birokrasi nasional dengan salah satu pelaksananya adalah Tim penjaminan Kualitas (*quality assurance*) reformasi birokrasi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Komite Pengarah RB yaitu Wakil Presiden. Berikut diinformasikan beberapa hal terkait TQA RBN yaitu:

A. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Negara PAN dan RB No. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional yang diubah menjadi Keputusan MenPAN dan RB No 37 Tahun 2012 dan terakhir No 84 Tahun 2013.

B. Struktur Organisasi



C. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Memastikan pelaksanaan RB sesuai *Grand Design* dan *Road Map*
- 2) Memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan pelaksanaan RB kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
- 3) Identifikasi dan analisis kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan RB dan mitigasi risiko
- 4) Melaksanakan Monev dan QA sesuai penetapan Komite Pengarah
- 5) Memberikan dukungan kepada Tim Independen

D. Peran BPKP dalam mendukung Tugas TQA RB

Dengan penunjukan Kepala BPKP sebagai Ketua Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, BPKP memiliki peran

strategis dalam proses reformasi birokrasi nasional yaitu mendukung tugas TQA RB yaitu melalui SK Ketua Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*)/*Ex Officio* Kepala BPKP yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Ketua penjaminan Kualitas /*Ex Officio* Kepala BPKP Nomor : KEP-828/K/2013.

E. Perjalanan BPKP dalam Mendukung Tugas Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional dan BPKP

Tahun 2012

1. Penyusunan Pedoman Monev dan penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi nasional dan Penerbitan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev dan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan RB setelah melalui proses piloting implementasi pedoman pada 3 Kementerian/Lembaga yaitu:
 - 1) Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden
 - 2) Kementerian Keuangan dengan uji petik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - 3) Kementerian PAN dan RB
2. Penjaminan Kualitas Pelaksanaan RB pada 2 K/L yaitu:
 - 1) BPK RI
 - 2) MA RI
3. Konsolidasi Hasil Survei atas Reformasi Birokrasi di Indonesia
Terhadap aktivitas tahun 2012, TQA telah menyampaikan hasilnya kepada Wakil Presiden RI dan telah memaparkannya di depan DPR RI.

Aktivitas Satgas TQA tahun 2013 diawali dengan melaksanakann verifikasi atas penilain kesiapan pelaksanaan RB pada 5 kementerian/lembaga serta penjaminan

kualitas pelaksanaan RB pada Kementerian Hukum dan HAM melalui penilaian atas PMRBN online. Adapun 5 kementerian/lembaga yang menjadi uji petik meliputi:

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Perhubungan
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kementerian pekerjaan Umum
5. BNP2TKI